

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1994, *Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
- Ayus Ahmad Yusuf, 2012, *Ekonomi Mikro*, Cirebon: Nurjati Press.
- Bagir Manan, 1996, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, bandung: Mandar Maju
- Bernhard Limbong, 2012, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Jakarta: Margaretha Pustaka
- , 2013. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 1970, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaanya*, Jilid I, Jambatan, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Djambatan.
- , 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (edisi revisi)*, Jakarta, Djambatan,
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebandaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Frank S. Alexander, 2011, *Land Banks and Land Banking*, Center For Community Progress, Washington
- H.B. Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press
- Hendra Nurjahjo, 2008, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Iman Soetikno, 1985, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jack Damen, 2004, *Land banking in The Netherlands in The Context of Land Consolidation*, International Workshop and FAO, Denmark.
- Jenifer Susanty. 2022. *TEORI AKUNTANSI Implementasi Teori Ekuitas dalam Pelaporan Akuntansi pada PT. Intiteknindo Mega Abadi*
- Juhaya Praja S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasinya*, Jakarta: Buku Kompas.
- , 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Yamin, 1954, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan.
- Mohammad Hatta, 1977, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Mutiara.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Edisi Revisi, Malang: UB Press.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mulyono Sadyohutomo, 2008, *Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nuruz Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah, Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Bandung: refika aditama.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.

Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Winahyu Erwatiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: UII Press

Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zaili Sailan, 2019, *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya*, FH UII Press, Yogyakarta.

Yudhi Setiawan, 2010, *Hukum Pertanahan Teori dan Praktek*, Malang: Banyumedia Publisng

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Bening Tyas Wijayanti, dkk, 2023, *Eksistensi Bank Tanah sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara*, Jurnal Private Law, Vol. 3, No, 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum dan Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah, disampaikan pada acara Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hlm. 1.

Black's Law Distionary, 1979, fift ed, St. Paul, Minn, USA, Hlm. 61

C.F. Benjamin L. D'ooge, 2006, *Latin Super Review, Research & Education Association*, USA; New Jersey, Hlm. 386

Dini Safitri, 2020, *Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif*, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 32),

Effendi Pasandaran, 2015, *Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33, No. 1

- Endang Pratiwi, dkk., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 2, Juni 2022, Hlm. 278.
- Endang Retnowati, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*, Jurnal Perspektif, Vol. 17, No. 1.
- Farah Devi. 2014. *Konsep Bank Tanah Sebagai Solusi Mengatasi Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Konsep Hukum Pertanahan di Indonesia*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Hlm. 18
- Fatimah Al Zahra. *Gagasan Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Volume 3 Nomor 2, 2017, Hlm. 94.
- Fidri Fadillah Puspita, dkk, *Urgensi Kehadiran Bank Tanah sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 3, 2021, hlm. 176.
- Frank S. Alexander. 2005. *Land Banking Authorities: A Guide for the Creation and Operation of Local Land Banks* (Local Initiatives Support Corporation). diakses dari www.lisc.org/resources pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 6
- , 2008, *Land banking as Metropolitan Policy* (Brookings Institution Metropolitan Policy Program), Diakses dari www.brookings.edu pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 3
- , 2011, *Land banking 101 – A National Perspective* (Illionois Center for Community Progress), Diakses dari home.cookcountyil.gov/.../Frank-Alexander-Land-Bank-101-Oc pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 3
- , 2011. *Land banks and land banking* (Center for Community Progress). Diakses dari www.communityprogress.net pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 18
- Friend Jeinold Pasuhuk, dkk., *Transparansi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timut Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Eksekutif, Volume 1 Nomor 1, 2018, Hlm. 3

Hairani Mochtar, *Keberadaan Bank Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18 Nomor 2, Desember 2013. Hlm. 127.

Himawan Arief Sugoto (Sekertaris Jenderal Kementerian ATR/BPN), Seminar: "Talk Show Bank Tanah di Masa Depan", Chanel youtube Kementerian ATR/BPN. 20 September 2022. Dapat diakses di <https://youtu.be/Zhsyanivuko>.

Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

Ilham Dwi Rafiqi, 2021, *Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic values*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 29, No. 1, hlm. 144–160.

Izziyana, O. S. M. & W. V. 2020. *Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Jurnal Rechstaat Nieuw, Vol. 1, No. 1.

Jack Damen, *Land Banking in the Netherlands in the context of Land Consolidation*, diakses dari http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2004/Land2004/Netherlands_paper.pdf pada tanggal 11 September 2022

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19

Ketut Wikantika, 2007, *Bank Tanah sebagai Alat Pengendali Harga Tanah*, hlm. 1 (DOI:[10.13140/RG.2.2.34873.16482](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34873.16482))

Lalolo Krina P. Loina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003, Hlm. 16

Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2006, Hlm. 16

Maria S.W. Sumardjono, *Memaknai Kembali Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tindak Lanjutnya, Kuliah Inagurasi sebagai Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Yogyakarta, tanggal 3 September 2013, Hlm. 1

Nurhayati, *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2017, Hlm. 51-52

Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.

Rozemarjin van den Berg et.al. 2005. *The Land Banking Principle – A Reconnaissance for Conditions and Practical Constrains for Application of the Land Banking Principle in the Netherlands*. Wagening University. Hlm. 5.

Siti Nur Alisa, *Tinjauan Normatif Tentang Fungsi Bank Tanah Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Hlm. 48

Soepomo, Dalam Pandangan Rapat Besar Tanggal 16 Juli 1945, Pembahasan tentang Soa; Ekonomi dan Tanah, Pandangan Soepomo tersebut tidak ditulis secara lengkap, namun diambil intisarinya.

Sofyan Djalil (Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI), Seminar: "Ada Bank Tanah di Undang-Undang Cipta Kerja, Ini Fungsinya", Chanel youtube CNBC Indonesia, 20 September 2022. Dapat diakses di <https://youtu.be/p8ELfGs10LE>

----- (Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI), Seminar: "Ada Bank Tanah di Undang-Undang Cipta Kerja, Ini Fungsinya", Chanel youtube CNBC Indonesia, 20 September 2022.

Sri Susyanti Nur, 2009, *Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan Dalam Bentuk Bank Tanah Guna Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Hlm. 52

Supratman Andi Agtas, *Laporan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang Cipate Kerja yang telah Diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR RI*, 6 Oktober 2020, hlm. 4

Terry Van Dijk dan Kopeva, 2006, *Land Banking and Central Europa: Future Relevance, Current Initiatives, Western European Past Experience* (Land Use Policy), Diakses dari books.google.com pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 290

United States Departemen of Housing and Urban Development, *Land Banking 101 – What is a Land Banking*, Diakses dari www.hud.gov/npst, pada tanggal 11 September 2022. Hlm. 290

Wahyu Bening dan Ilham Dwi Rafiqi, 2022, *Permasalahan Hukum Pertanahan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 4, No. 2.

Yagus Suyadi (Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN RI), Seminar: “Urgensi Pembentukan Bank Tanah dalam Pengelolaan Tanah Negara”, Chanel youtube ISPE BIN Official, 20 September 2022, dapat diakses di <https://youtu.be/OSMdEKqUriY>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Website

<https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/>

[https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6929714/jokowi-ungkap-pembebasan-lahan-jadi-momok-proyek-di-ri,](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6929714/jokowi-ungkap-pembebasan-lahan-jadi-momok-proyek-di-ri)

[https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7667/memahami-mekanisme-pembebasan-tanah-proyek-nasional?lang=1,](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7667/memahami-mekanisme-pembebasan-tanah-proyek-nasional?lang=1)

[https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/31/13132831/proyek-sodetan-ciliwung-sempat-mangkrak-jokowi-karena-pembebasan-lahannya,](https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/31/13132831/proyek-sodetan-ciliwung-sempat-mangkrak-jokowi-karena-pembebasan-lahannya) diakses 1 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank-tanah-terhadap-reforma-agraria-lt60abb177a188a/?page=all>

<https://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/>

<https://banktanah.id/perjanjian-pemanfaatan-badan-bank-tanah-dengan-bumdes-tengkurak/>

<https://banktanah.id/investasi/>